**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN SISTEM DATA POKOK PENDIDIKAN
(DAPODIK) TERHADAP KEPEGAWAIAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN.
(STUDI KASUS DI SMP N 1 PENEHEL)**

I Ketut Sukantha Artha Wibawa*¹,
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana Tabanan
E-mail : ketutsukantha8@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, dengan fokus pada studi kasus di SMPN 1 Penebel. Sistem Dapodik merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data pendidikan secara terintegrasi, dan peranannya sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, staf pengelola Dapodik, serta observasi terhadap proses pengelolaan dan pemanfaatan data di SMPN 1 Penebel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Dapodik di SMPN 1 Penebel sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan sumber daya manusia yang perlu diperbaiki. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan pelatihan untuk operator, masalah infrastruktur teknologi, serta kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam pembaruan data secara berkala. Meskipun demikian, program Dapodik memberikan dampak positif dalam penyusunan laporan pendidikan yang lebih akurat dan transparan, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas implementasi Dapodik, khususnya di tingkat sekolah, guna mendukung sistem pendidikan yang lebih baik dan efisien. Faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan program penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan seperti : Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, salah satu faktor utama yang sering menghambat implementasi kebijakan adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari pegawai atau tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dapodik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Dapodik, Dinas Pendidikan, SPN 1 Penebel

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia, termasuk pengelolaan data pendidikan. Permasalahannya belum semua operator memahami dalam penggunaan sistem data pokok pendidikan dimana pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi dan data pendidikan yang akurat sebagai dasar untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Dapodik menjadi salah satu instrumen untuk memenuhi kewajiban ini.

Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten juga saling berhubungan mengenai sistem data pokok pendidikan ini dimana ketika mengalami kesulitan dalam pendataan lembaga dan pengiriman data secara online Dinas Pendidikan yang akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai alat bantu para operator untuk mengirim data siswa, sekolah, guru atau karyawan secara kolektif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengelolaan data pokok pendidikan dasar menengah yaitu dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Pengguna (Operator Sekolah) di SMP N 1 Penebel, masih ada kendala-kendala yang dialami pengguna dalam penggunaan sistem data pokok pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada Operator Sekolah dan Operator Dinas, kendala yang ditemukan adalah:

1. Banyak operator sekolah yang kurang memahami penggunaan Sistem Informasi Dapodik.
2. Operator sekolah merasa rumit dalam pengaturan data pendidikan.
3. Kesulitan dalam sinkronisasi (pengiriman data) ke pusat disebabkan jadwal sinkronisasi yang bersamaan dengan operator sekolah yang lain.
4. Setiap ada perubahan versi, operator merasa kesulitan dikarenakan adanya penambahan dan perubahan data yang baru.

Berdasarkan dengan adanya kendala diatas terlihat adanya permasalahan antara Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Operator sekolah. Permasalahan ini akan mempengaruhi dan menghambat penerimaan

pengguna terhadap Sistem Informasi Dapodikdasmen tersebut. Peneliti melakukan penelitian ini untuk 1). mengetahui terkait dengan “Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terhadap Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, 2). mengetahui Faktor apa saja yang menghambat “Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terhadap Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut Cresswell J.W (2010:12) mengemukakan bahwa “Kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan pada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada ,dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

- 1). **Angga Winata Harahap** STKIP BUDIDAYA BINJAI 2019, judul, Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Mengelola Data Pokok Peserta Didik Dengan Menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2021.C Di Sma Negeri 4 Binjai.
- 2). **Ni Putu Tirka Widanti** Universitas Ngurah Rai Denpasar 2022 Implementasi Kebijakan Interdependensi Fakta-Nilai Dalam Proses Penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama Green School Bali
- 3). **RISKA DAMAYANTI** Akademik Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Ibnu Khaldun Palopo Judul :Implementasi Dan Optimalisasi Dapodik Di Smkn 4 Palopo 2024

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. “Implementasi menurut teori Jones bahwa: “*Those Activities directed toward putting a program into effect*”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”

2.3 Kebijakan Program

Kebijakan program adalah kebijakan yang dirancang secara khusus untuk mengatur pelaksanaan suatu program atau kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga, organisasi, atau pemerintah. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program agar berjalan secara efektif, efisien, dan terarah.

Ciri-ciri kebijakan program:

1. Bersifat operasional – fokus pada pelaksanaan kegiatan nyata.
2. Spesifik dan terfokus – menysasar isu atau permasalahan tertentu.
3. Berdasarkan kebijakan umum – merupakan turunan dari kebijakan yang lebih luas.
4. Berorientasi pada hasil – dirancang untuk mencapai tujuan atau target yang terukur.

Contoh:

- Kebijakan program penanggulangan kemiskinan: berisi pedoman tentang siapa yang menjadi sasaran, bagaimana bantuan disalurkan, dan indikator keberhasilan.

- Kebijakan program imunisasi nasional: mengatur jadwal pelaksanaan, jenis vaksin, dan kelompok sasaran.

2.4 Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan “bahwa sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pattern atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya.

- 1) Pendekatan sistem pada prosedurnya Sebuah sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah.
- 2) Pendekatan sistem pada komponennya Sebuah sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berdasar dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.5 Pengertian Dapodik

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem informasi yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan memverifikasi data pendidikan di seluruh Indonesia secara real-time . Sistem ini melibatkan pengumpulan data dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah yang mencakup berbagai aspek seperti data siswa, data guru, sarana prasarana, dan berbagai data lainnya yang relevan. Implementasi Dapodik bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data pendidikan .

Dalam beberapa tahun terakhir, Dapodik telah menjadi alat penting dalam pengelolaan data pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan sistem ini, sekolah-sekolah dapat mengelola data mereka dengan lebih efisien, memperbarui informasi secara cepat, dan memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan terkini. Keakuratan dan kecepatan ini sangat penting untuk mendukung berbagai kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah.

Namun, seperti halnya implementasi teknologi baru di banyak institusi, penerapan Dapodik di SMP N 1 Penebel tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai, yang sering kali menghambat akses dan penggunaan sistem ini secara optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai sistem ini juga menjadi kendala signifikan yang mengurangi efektivitas penggunaan Dapodik oleh staf administrasi dan guru.

Referensi-referensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dan optimalisasi Dapodik di sekolah-sekolah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi oleh SMP N 1 Penebel dan menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

2.6 Pengertian Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah suatu instansi atau lembaga pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota), dan memiliki fungsi utama dalam merancang, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi kebijakan pendidikan di wilayah kerjanya.

Tugas utama Dinas Pendidikan meliputi:

1. Perencanaan program pendidikan di daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pendidikan, seperti kurikulum, pelatihan guru, dan pembangunan sarana-prasarana sekolah.

3. Pengawasan dan evaluasi mutu pendidikan.
4. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Penyelenggaraan layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah.

Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kecamatan Penebel juga saling berhubungan mengenai sistem data pokok pendidikan ini dimana ketika mengalami kesulitan dalam pendataan lembaga dan pengiriman data secara online Dinas Pendidikan yang akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai alat bantu para operator untuk mengirim data siswa, sekolah, guru atau karyawan secara kolektif. Dinas Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional di tingkat daerah, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan pemerataan akses pendidikan.

2.7 SMPN 1 Penebel

SMPN 1 Penebel adalah salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Sekolah ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan di wilayah tersebut dan telah berkembang sejak didirikan. Berikut adalah gambaran sejarah singkat SMPN 1 Penebel, SMPN 1 Penebel didirikan dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Kecamatan Penebel dan sekitarnya. Sebagai salah satu sekolah negeri pertama di wilayah ini, SMPN 1 Penebel mulai beroperasi pada tahun 1970-an.

Pada awal berdirinya, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat sederhana, namun seiring berjalannya waktu, SMPN 1 Penebel mengalami banyak perkembangan, baik dari segi gedung, tenaga pengajar, maupun sarana prasarana lainnya. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat setempat, fasilitas pendidikan yang ada terus diperbaiki untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik.

Dengan visi dan misi yang terus berkembang, SMPN 1 Penebel bertujuan untuk terus menjadi sekolah yang berkualitas dan mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya lokal. Seiring berjalannya waktu, SMPN 1 Penebel terus berupaya memberikan pendidikan

terbaik bagi siswa-siswanya dan selalu berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi serta memiliki akhlak yang baik

3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Muhamamad Ramdhan (2021:7), penelitian deskriptif ialah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti, dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas.

Metode penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata dan kalimat baik tertulis maupun lisan yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta pada situs penelitiannya dan ikut berperan aktif mengikuti kegiatan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memaparkan secara menyeluruh mengenai **“Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terhadap Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan”**.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:121) Informan dalam penelitian ini adalah:

DAFTAR INFORMAN

NAMA INFORMAN	JABATAN
I Made Suarnatha Atmaja, S.Pd	Kepala Sekolah
Ni Made ani Ariyanti, S.E	Bidang Kepegawaian BOS
Ni Nyoman Sri Arwiani, A.Md	Keu. Bidang Bendahara
I Gde Eka Adnyana, S.Sos	Kordinator TU
I Made Putra Yasa,	Operator Dapodik

Sumber dari SMPN 1 Penebel Tabanan

Pertimbangan peneliti menentukan karakteristik atau kriteria informan penelitian di atas, yaitu agar informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bisa lebih

akurat karena melibatkan informan penelitian yang benar-benar memahami fungsi partai politik dalam rekrutmen kader Perempuan pada pemilu 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1). Teknik observasi, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian meliputi: proses kerja operator LPSE dan SIMPEG dalam melakukan input data serta pengolahan berkas-berkas yang diperlukan saat penginputan data.
- 2). Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Ridwan,2006:74). Pokokpokok masalah tersebut dikembangkan dalam bentuk berbagai pertanyaan yang disesuaikan dengan karakteristik informan, sehingga wawancara dapat berlangsung tanpa terjebak pada suasana yang kaku. Hasil wawancara direkam atau dicatat secara manual tergantung kesepakatan antara peneliti dengan informan.
- 3). Teknik pemanfaatan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE dan juga laporan data kepegawaian, absensi sidik jari.

4. Hasil Penelitian

4.1 Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terhadap Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Study Kasus Di SMPN 1 Penebel.

Implementasi kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas dan pengelolaan pendidikan di daerah tersebut. Meskipun ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur, manfaat yang dihasilkan dari program ini sangat signifikan, baik dalam meningkatkan akurasi data, mendukung perencanaan pendidikan, maupun menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan harus terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini agar program Dapodik dapat

berjalan dengan optimal dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di daerah tersebut.

Wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa Implementasi Dapodik tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerjasama ini penting untuk memastikan sistem Dapodik dapat berjalan dengan baik, serta memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di bidang pendidikan.

Manfaat Implementasi Dapodik

1). Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya pendidikan dengan lebih efektif. Ini termasuk distribusi anggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran dan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2). Mempermudah Pengambilan Keputusan

Dapodik lebih mudah dalam pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data. Misalnya, menentukan kebutuhan tenaga pengajar atau fasilitas sekolah berdasarkan data yang tersedia.

3). Transparansi dan Akuntabilitas

Program Dapodik juga mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan pendidikan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kondisi pendidikan di wilayah mereka dan mengetahui bagaimana alokasi dana pendidikan digunakan.

4.2. Faktor yang menghambat “Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Terhadap Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan

Faktor-faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan program penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan seperti : Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, salah satu

faktor utama yang sering menghambat implementasi kebijakan adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari pegawai atau tenaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dapodik. Jika para tenaga pendidik dan operator di Dinas Pendidikan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem Dapodik atau kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi, maka pengelolaan data pendidikan akan terhambat. Selain itu, kekurangan pelatihan yang sesuai juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan kemampuan SDM, seperti yang diungkapkan oleh Ni Made Ani Ariyanti, SE (bidang kepegawaian) pada saat wawancara pada hari senin tanggal 6 Januari 2025.

Tantangan dalam Implementasi Dapodik di Kabupaten Tabanan

- 1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), tidak semua pengelola data di tingkat sekolah memiliki keterampilan teknis yang cukup dalam mengoperasikan Dapodik. Oleh karena itu, pelatihan secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi.
- 2). Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, di beberapa wilayah di Kabupaten Tabanan, terutama di daerah pedesaan, terdapat keterbatasan akses internet dan perangkat komputer. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penginputan data secara tepat waktu dan akurat.
- 3). Kesulitan dalam Verifikasi Data, Salah satu tantangan yang dihadapi adalah verifikasi data yang sering kali tidak mudah dilakukan. Terkadang, informasi yang diinputkan oleh sekolah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan upaya untuk memastikan akurasi data tersebut.
- 4). Perubahan Kebijakan yang Cepat, Kebijakan terkait Dapodik sering mengalami pembaruan, yang menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan dan sekolah-sekolah untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam pengelolaan data. Hal ini membutuhkan fleksibilitas dan kesiapan dalam merespon perubahan kebijakan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Dinas Pendidikan, Kabupaten Tabanan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Implementasi Kebijakan Program Penyelenggaraan Dapodik di SMPN 1 Penebel di bawah pembinaan Disdik Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan instruksi

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 2 tahun 2011 tentang kegiatan pengelolaan data pendidikan karena segala kewajiban dan prosedur pengelolaan Dapodik untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Penebel.

- 2). Salah satu hambatan utama adalah masih adanya keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa sekolah, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai untuk mendukung penggunaan sistem Dapodik secara maksimal. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis di kalangan operator sekolah atau petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola data Dapodik menjadi kendala. Beberapa operator di tingkat sekolah belum sepenuhnya memahami cara penginputan dan pemeliharaan data dengan benar.

5.2 Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat memberikan saran, yaitu:

- 1). Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di setiap sekolah, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Ini akan membantu memperlancar proses pengumpulan dan pengelolaan data Dapodik. Menyelenggarakan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan bagi operator sekolah, guru, dan staf terkait agar mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem Dapodik dengan baik. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Perlu adanya sistem koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif perlu dilakukan untuk memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan data Dapodik.
- 2). Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu melakukan upaya perbaikan infrastruktur, seperti meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan internet di sekolah-sekolah, serta menyediakan perangkat keras yang memadai untuk mendukung penggunaan sistem Dapodik. Pengadaan perangkat keras seperti komputer dan perangkat pendukung lainnya juga perlu diperhatikan untuk memastikan kelancaran operasional sistem. Dinas Pendidikan harus mengadakan pelatihan teknis secara

berkala bagi operator sekolah dan tenaga pendidik lainnya terkait penggunaan sistem Dapodik. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis dan pemahaman terkait pentingnya pengelolaan data yang akurat. Sebaiknya Dinas Pendidikan perlu mengusulkan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi Dapodik, termasuk anggaran untuk pembelian perangkat, pelatihan, dan pemeliharaan sistem. Kerjasama dengan pihak swasta atau program bantuan luar negeri bisa dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan pendanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi Dapodik di Kabupaten Tabanan dapat diatasi, sehingga sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi sektor pendidikan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : Prenadamedia group.
- Abdullah, M. W., & Yuliana, A. (2018). *Corporate environmental responsibility: An effort to develop a green accounting model*. Jurnal Akuntansi, 22(3), 305- 320.
- Abriyanto, A.E., Sabikis & Sudarso, 2012, Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanol Daun Sembukan (*Paederia foetida* L) terhadap *Candida albicans*. Pharmacy, 09(03), pp.1–10.
- Agus, Hermawan. 2012. Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Anderson dan Krathwohl (2017) . Pembelajaran, Prngajaran, Dan Asesmen . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Usman, Husaini. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ali, M dan Asrori, M. (2015). Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Kasara.
- Arifin, J. (2017). SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakry, Umar Suyadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basri, Burhanudin dkk. 2020. Konsep Dasar Dokumentasi Keperawatan. Bandung : Media Sains Indonesia

- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Djogo, Tony et al. 2003. Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF), Southeast Asia Regional Office. Bogor Hal 4
- Dr. Sudaryono, (2015). “Pengantar Bisnis, Teori dan Contoh Kasus.” Penerbit Andi Yogyakarta
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzan, Ahmad. 2002. *Applying Realistic Mathematics Education (RME) in Teaching Geometry in Indonesian Primary School*. Online <http://doc.utwente.nl/58707/1/diakses> 30 September 2012
- Hasibuan, Malayu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2016. Manajemen. Yogyakarta : BPFE
- Jogiyanto. 2009. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Kadarisman. (2017). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Rosada.
- Kerlinger. 2006. Asas-Asas Penelitian *Behavior*. Edisi Ketiga, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komala, L. (2018). Ilmu Komunikasi. Bandung: Widya Padjajaran.
- Moleong (2018), penelitian kualitatif edisi revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Ramdhan. (2021). Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mulyadi. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit In Media. Jakarta
- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Angga Winata Harahap STKIP BUDIDAYA BINJAI 2019 Implementasi Kebijakan Satu Data Dalam Mengelola Data Pokok Peserta Didik Dengan Menggunakan Aplikasi Dapodik Versi 2021.C Di SMA Negeri 4 Binjai.
- Ni Putu Tirka Widanti Universitas Ngurah Rai Denpasar 2022 Implementasi Kebijakan Interdependensi Fakta-Nilai Dalam Proses Penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama Green School Bali.
- RISKA DAMAYANTI Akademik Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Ibnu Khaldun Palopo, Implementasi Dan Optimalisasi Dapodik Di Smkn 4 Palopo 2024

Perundang-undangan

-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
-Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan

Website :<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 11 Januari 2017 tentang proses pemutakhiran